



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 12 Oktober 2020

Halaman: 2

Tarif Tes Usap Ikuti Standardisasi Kemenkes

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta akan mengikuti kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait aturan tarif tertinggi tes usap atau swab untuk mendeteksi Covid-19. Biaya tes usap terkait pelacakan kasus Covid-19 ditanggung pemerintah. "Secara umum kami akan ikuti apa yang jadi kebijakan kementerian," kata Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Minggu (11/10).

Kemenkes telah menerbitkan Surat Edaran nomor HK. 02.02/1/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab adalah Rp 900 ribu. Batasan tarif itu berlaku un-

tuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri atau mandiri.

Menurutnya pengaturan tarif tertinggi tes usap itu terkait dengan bahan kesehatan Covid-19. Mungkin saja, lanjutnya, semakin lama, harganya semakin turun karena ketersediaan bahan semakin banyak. "Aturan itu lebih ditujukan untuk tes usap mandiri atau inisiatif warga karena untuk kepentingan misal bepergian atau keperluan lainnya," ujarnya.

Terhadap aturan itu bagi layanan swasta yang menyediakan tes usap mandiri, dia berpendapat menjadi kewenangan tiap manajemen. Mengingat semua bahan, alat-alat dan bahan untuk menganalisis Covid-19 pihak rumah sakit dan laboratorium swasta

yang menyediakan sendiri. "Selama ini tes usap mandiri sebagian besar di layanan rumah sakit dan laboratorium swasta. Mereka menyediakan layanan beragam dan pengelolaan secara manajemen di tiap rumah sakit dan laboratorium swasta," papar Heroe.

Dia menyatakan rumah sakit milik Pemkot Yogyakarta yakni RS Jogja dan RS Pratama tidak melayani tes usap mandiri. Selama ini kedua rumah sakit itu hanya melayani pengambilan dahak atau reagen untuk keperluan tes usap dahak. Pengujian tes usap dahak dilakukan pada laboratorium atau rumah sakit milik pemerintah yang telah memiliki kemampuan menganalisis tes usap Covid-19.

"Selama menyangkut penanganan kasus untuk *tracing* dan *blocking*, selu-

ruh biaya ditanggung pemerintah, sehingga warga tidak bayar. Kami prinsip tidak akan mencari untung pelayanan untuk mengatasi Covid. Ibaratnya kami justru mengeluarkan uang banyak untuk membeli bahan kesehatan penanganan Covid-19," jelas Heroe.

Dia menyebut Pemkot Yogyakarta sudah melakukan tes usap total sekitar 4.400 dan rapid test sekitar 20.000 untuk pelacakan dan membendung sebaran kasus Covid-19. Pihaknya menuturkan sudah mengusulkan ke Kementerian Kesehatan terkait pengadaan alat untuk menganalisis Covid-19 pada tes usap bagi Rumah Sakit Jogja. Usulan alat untuk analisis uji molekul PCR diusulkan sejak awal kasus virus corona merebak di Indonesia, tapi hingga kini belum ada kejelasan. (Tri)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005